



**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TANI PADI DENGAN PENDEKATAN
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)**

***Development Strategy of Rice Farming Using the Analytical Hierarchy
Process (AHP) Approach***

Asrahmaulyana^{1*}, Suci Angreny²

^{1*,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*email: asrah.mauliyana@uin-alauddiun.ac.id

Article History: Received: November 30, 2024; Revised: March 30, 2025; Accepted: May 03, 2025

ABSTRAK

Pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling terkait. Aspek-aspek tersebut meliputi ketersediaan dan efisiensi faktor produksi, praktik budidaya yang berkelanjutan, penanganan pasca panen yang optimal, dukungan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, dan keberadaan kelembagaan petani yang kuat. Untuk merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan holistik, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek tersebut secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam pengembangan usahatani dan merumuskan strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap, dengan mempertimbangkan kelima aspek utama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek faktor produksi (26.9%) merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Temuan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada penyediaan faktor produksi yang berkualitas dan terjangkau bagi petani. Aspek-aspek lain seperti budidaya (23.8%), pasca panen (18.5%), kebijakan pemerintah (17.3%), dan kelembagaan (13.5%) juga memerlukan perhatian, namun kebijakan yang mendukung ketersediaan dan aksesibilitas faktor produksi akan memberikan dampak yang paling signifikan. Meskipun faktor produksi memiliki bobot tertinggi, penting untuk dicatat bahwa kelima aspek tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Strategi pengembangan yang efektif harus mempertimbangkan keterkaitan ini dan mengupayakan peningkatan di semua aspek, dengan memberikan perhatian khusus pada perbaikan sistem faktor produksi sebagai kunci utama.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Faktor Produksi, Budidaya, Pasca Panen, *Analysis Hierarchy Process (AHP)*

ABSTRACT

The development of rice farming in Sidrap Regency is a complex issue influenced by various interrelated aspects. These aspects include the availability and efficiency of production factors, sustainable cultivation practices, optimal post-harvest handling, targeted government policy support, and the presence of strong farmer institutions. To formulate an effective and holistic development strategy, an approach is needed that can systematically integrate these various aspects. This study aims to apply the



Analytical Hierarchy Process (AHP) method to identify key factors in farming development and to formulate strategies for the development of rice farming in Sidrap Regency, taking into account the five main aspects. The results show that the production factor aspect (26.9%) is the dominant factor in determining the success of rice farming development in Sidrap Regency. This finding highlights the need for government policies that focus more on providing farmers with high-quality and affordable production inputs. Other aspects, such as cultivation (23.8%), post-harvest (18.5%), government policy (17.3%), and institutional support (13.5%), also require attention. However, policies that support the availability and accessibility of production factors will have the most significant impact. Although production factors hold the highest weight, it is important to note that these five aspects are interconnected and mutually influential. An effective development strategy must consider these interconnections and strive to improve all aspects, with particular attention to enhancing the production factor system as the key priority.

Keywords: Development Strategy, Production Factors, Cultivation, Post-Harvest, Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga berperan dalam transformasi sosial-ekonomi masyarakat (Issalillah & Wisnujati, 2021). Perspektif ini menekankan bahwa pertanian bukan sekadar sektor produksi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun demikian, sebagian literatur cenderung menekankan aspek makro seperti kontribusi terhadap PDB dan ketahanan pangan, dengan sedikit fokus pada dimensi mikro seperti strategi pengembangan berbasis wilayah spesifik. Oleh karena itu, kajian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada level lokal, yaitu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini bertolak dari kesenjangan tersebut dengan menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai lokasi studi. Sidrap dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, namun potensi tersebut belum diimbangi dengan strategi pengembangan usaha tani yang terintegrasi. Kajian sebelumnya (misalnya Rosalina, 2017) lebih menyoroti aspek spasial atau infrastruktur, tanpa membahas secara komprehensif hubungan antara faktor produksi, praktik budidaya, penanganan pasca panen, kebijakan pemerintah, dan kelembagaan petani.

Secara teoretis, studi ini mendasarkan diri pada kerangka Teori Produksi dalam ekonomi klasik dan neoklasik. Teori Marshall, 1924 (William, 1967) menekankan pentingnya efisiensi dalam kombinasi faktor produksi dan respons produsen terhadap perubahan pasar. Clark, 2015 (Mukhlisiana & Adry, 2021) lebih menyoroti hubungan antara tambahan unit tenaga kerja dengan hasil produksi yang semakin berkurang setelah titik tertentu, yang dikenal dengan hukum hasil yang semakin berkurang. Meskipun teori ini memberikan wawasan terkait efisiensi penggunaan tenaga kerja, dalam sektor pertanian, faktor lain seperti musim, geografis, dan risiko alamiah sering kali lebih mempengaruhi produktivitas daripada hanya menambahkan tenaga kerja semata, meskipun sebagian besar sudah disederhanakan teori ini merupakan model yang

dikembangkan oleh John Bates Clark dalam buku *The Distribution of Wealth*.

Di sisi lain Sukirno (2002) juga menunjukkan bagaimana satu faktor produksi (misalnya tenaga kerja) dapat dimodifikasi untuk menghasilkan peningkatan produksi. Namun, model ini menyederhanakan realitas di lapangan, di mana banyak faktor lain selain tenaga kerja yang turut memengaruhi hasil pertanian. Misalnya, ketersediaan modal, kualitas tanah, atau dukungan teknologi, yang tidak dapat dianggap tetap dalam analisis semacam ini.

Sedangkan teori produksi dalam buku yang berjudul "*On the Principles of Political Economy and Taxation*" menyatakan bahwa "Hukum Tambahan Hasil yang Semakin Berkurang" yang artinya, Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Akan tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, maka produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif (*law of diminishing returns*) (Ricardo, 1817).

Pendekatan Transformasi Struktural Lewis, 1954 (Purnama, R. P. A. 2014) menganggap sektor pertanian sebagai sektor awal yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri melalui surplus tenaga kerja. Pendekatan ini menekankan pentingnya modernisasi dan efisiensi produksi. Pendekatan Pembangunan Partisipatif dan Berkelanjutan mengkritisi pandangan Lewis yang terlalu fokus pada migrasi tenaga kerja. Menurut Chambers 1994 (Hura S.L, 2024), pembangunan seharusnya menempatkan petani sebagai aktor utama, bukan objek pembangunan. Pendekatan ini menekankan konteks lokal, kearifan tradisional, dan keberlanjutan ekologis.

Namun, pendekatan teori produksi klasik dan neoklasik tersebut mendapat kritik karena cenderung mengabaikan faktor kelembagaan, sosial-budaya, serta kebijakan yang memengaruhi proses produksi secara riil di tingkat lokal. Dalam hal ini, pendekatan integratif yang menggabungkan faktor teknis dan kelembagaan menjadi sangat penting, terlebih dalam sektor seperti pertanian yang bersifat padat modal sosial dan dipengaruhi oleh banyak variabel non-ekonomi.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah membahas pengembangan usaha tani padi dari sudut pandang faktor produksi, praktik budidaya, ataupun kebijakan pemerintah secara terpisah, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan seluruh aspek utama secara sistematis dalam satu kerangka analisis holistic misalnya, Sakina (2020) hanya membahas aspek pengadaan input, sedangkan Setiawan & Fafurida (2013) lebih fokus pada usaha tani kedelai di Grobogan dan Pratama & Sahaya (2014) yang meneliti usaha kedelai di Jawa Tengah. Namun, belum ada penelitian yang menggabungkan semua aspek tersebut dalam satu analisis yang komprehensif di Kabupaten Sidrap.

Kurangnya Keterkaitan Aspek dalam Pengembangan: Banyak penelitian yang membahas aspek pengembangan usaha tani secara terpisah, seperti yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. (2016) untuk kopi. Namun, belum ada penelitian yang menggabungkan semua faktor (produksi, kebijakan, kelembagaan, dll.)

secara holistik dalam pengembangan usaha tani padi di Kabupaten yang sama yaitu Sidrap.

Selain itu, penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam konteks pengembangan usaha tani padi secara komprehensif, khususnya di Kabupaten Sidrap, masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Siburian dkk. (2017) dan Arista, dkk (2018) juga menggunakan *AHP* untuk perencanaan strategi usaha di Kabupaten Sidrap, tetapi tidak menyajikan strategi yang berbasis prioritas pengembangan usaha tani padi secara sistematis dan terukur, jadi belum ada yang fokus pada usaha tani padi di Sidrap dengan pendekatan yang sama. Padahal, pendekatan integratif ini penting untuk mengidentifikasi prioritas strategis secara objektif dan terukur dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian.

Belum adanya strategi pengembangan usaha tani padi yang terintegrasi dan berbasis prioritas di Kabupaten Sidrap, padahal pengembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek saling terkait seperti faktor produksi, budidaya, pasca panen, kebijakan pemerintah, dan kelembagaan petani. Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi aktual usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap, serta merumuskan strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap.

Oleh karena itu, penelitian ini secara normatif berfokus pada perumusan strategi pengembangan usaha tani padi yang terintegrasi di Kabupaten Sidrap dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Fokus utama diarahkan pada Identifikasi faktor-faktor krusial dalam pengembangan usaha tani padi, Analisis tingkat kepentingan relatif dari masing-masing aspek (produksi, budidaya, pasca panen, kebijakan, kelembagaan), dan Perumusan strategi prioritas pembangunan berbasis data lokal dan pertimbangan teknokratik.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur, tetapi juga menawarkan landasan normatif bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi pembangunan pertanian yang lebih kontekstual dan berdampak langsung bagi petani lokal.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang menekankan pada pengolahan data numerik untuk menentukan prioritas dari berbagai kriteria secara objektif. Melalui *AHP*, peneliti dapat mengukur tingkat kepentingan relatif antar variabel berdasarkan persepsi responden, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan terukur dalam pengambilan keputusan strategi pengembangan usaha tani. Pemilihan Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengembangan usahatani padi di daerah tersebut. Hal ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang relevan dan menjadi

prioritas dalam proses mengembangkan usahatani padi di Kabupaten Sidrap.

Penelitian dilakukan secara langsung atau melalui kegiatan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi serta memahami permasalahan yang dihadapi. Populasi target dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait pengembangan usahatani padi di Kabupaten Sidrap. Sampel penelitian terdiri dari 90 responden yang dipilih menggunakan Teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa responden memiliki informasi kunci dan wawasan yang mendalam tentang isu-isu terkait. Rincian sampel adalah sebagai berikut: 14 Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap, 35 Pegawai Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), dan 41 orang Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Sidrap.

Adapun justifikasi kelayakan informan diantaranya adalah: memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan usahatani padi sawah, serta memiliki peran dalam implementasinya, memiliki akses ke data dan informasi tentang produksi padi, luas lahan, penggunaan input, dan kinerja usahatani padi sawah di Kabupaten Sidrap, memiliki perspektif makro tentang pengembangan usahatani padi sawah, termasuk tantangan dan peluang di tingkat kabupaten, serta keterkaitan dengan sektor lain, dipilih berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, memastikan bahwa mereka adalah staf yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang relevan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (kuesioner). Kuesioner ini digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan masyarakat terkait Pengembangan Usahatani Padi di Kabupaten Sidrap. Kuesioner ini akan mencakup kriteria, subkriteria, dan alternatif yang akan disebarkan kepada Pegawai Dinas Pertanian, Pegawai BPP dan Ketua Kelompok Tani Padi Sawah di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Analitycal Heararchy Process (AHP)* yang merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki.

Menurut Saaty (1994), hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. Perangkat lunak yang biasa digunakan dalam metode *AHP* yaitu *Tools Analysis Software Expert Choice 11*.

Menurut Saaty (1994), langkah-langkah penyelesaian metode *AHP* dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menyusun hirarki, dilakukan untuk menjelaskan masalah secara terstruktur dan mudah untuk dipahami.
2. Penyusunan prioritas yaitu dalam menentukan prioritas kriteria adalah dengan menyusun perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub sistem hirarki. Perbandingan

tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan untuk analisis numerik. yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A ₁	A ₂	...	A _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	...	a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	...	a _{2n}
...
A _m	a _{m1}	a _{m2}	...	a _{mn}

Sumber: Thomas L Saaty, Tahun 1994

Nilai a₁₁, a₂₂ ... a_{mn} adalah nilai perbandingan elemen baris A₁ terhadap kolom A₁ yang menyatakan hubungan:

- a. Seberapa jauh tingkat kepentingan baris A₁ terhadap kriteria C dibandingkan dengan kolom A₁.
- b. Seberapa jauh dominasi baris A₁ terhadap kolom A₁ atau,
- c. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada baris A₁ dibandingkan dengan kolom A₁.

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 2. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya
7	Elemen yang satu sangat penting dari elemen lainnya
9	Elemen yang satu mutlak sangat penting dari elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antaradua nilai pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan dibandingkan i

Sumber: Thomas L Saaty, Tahun 1994

3. Sintesis, untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan maka pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan perlu dianalisis. Dalam langkah ini, hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.
 - b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.
 - c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
4. Pengujian konsistensi, ini dilakukan untuk mengetahui apakah bobot nilai dari kriteria sudah konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten maka akan dilakukan revisi perhitungan atau dilakukan pembobotan kriteria ulang. Perhitungan konsistensi adalah menghitung penyimpangan dari konsistensi nilai, dari penyimpangan ini disebut Indeks Konsistensi dengan persamaan:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

Dimana: λ_{maks} = *Eigen Value Maksimum*; n = ukuran matriks

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio konsistensi:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana: CR = Rasio konsistensi (*Consistency Ratio*); CI = Indeks konsistensi (*Consistency Index*); RI = Indeks random (*Indeks Random Consistency*)

Tabel 3. Indeks Random

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Thomas L Saaty, Tahun 1994

Validitas instrumen *AHP* diukur melalui nilai Consistency Ratio (CR) yang otomatis dihitung oleh Expert Choice 11. Jika nilai $CR \leq 0.1$, maka jawaban responden dianggap konsisten dan instrumen valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk dihitung geomennya (*geometric mean*), yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden.

Tabel 4. Hasil perhitungan rata-rata geometris responden

	Faktor Produksi	Budidaya	Kebijakan Pemerintah	Kelembagaan	Pasca Panen
Faktor Produksi	1	1.16	2.35	1.68	1.10
Budidaya	0.86	1	1.12	2.75	1.04
Kebijakan Pemerintah	0.42	0.89	1	1.50	1.01
Kelembagaan	0.59	0.36	0.66	1	1.08
Pasca Panen	0.90	0.95	0.98	0.91	1

Sumber: Hasil Olah Data primer, Tahun 2024

Tahap selanjutnya adalah *Pairwise Comparison*, yaitu penilaian secara komparatif berpasangan. Setiap faktor baik berupa objektif/kriteria, sub objektif dan alternatif keputusan ditentukan bobotnya dengan mengadakan perbandingan sepasang-sepasang. Maksudnya adalah elemen-elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan.

Pada implementasi menggunakan *Expert Choice*, sering disebut dengan proses *assessment*. Proses ini dimulai dengan membandingkan secara berpasangan yang dimulai kriteria yang telah ditentukan. Dilanjutkan sub kriteria terhadap sub kriteria yang lainnya, dan terakhir membandingkan antara membandingkan antara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain sesuai dengan tingkat prioritas yang diinginkan. Apabila proses *assessment* telah selesai kemudian proses perhitungan dari *assessment* yang telah dibuat. Pada proses ini digunakan untuk mengetahui nilai *inconsistency* dari elemen yang di *assessment*.

Tabel 5. Bobot Level Pertama Faktor Pengembangan Usaha Tani Padi

Faktor	Bobot	Presentase	Rangking
Faktor Produksi	269	26.9%	1
Budidaya	238	23.8%	2
Pasca Panen	185	18.5%	3
Kebijakan Pemerintah	173	17.3%	4
Kelembagaan	135	13.5%	5

Inkonsistensi=0.03

Sumber: Hasil Olah Data primer, Tahun 2024

Hasil perhitungan *AHP* pada tabel di atas menunjukkan bahwa aspek faktor produksi menempati posisi prioritas utama dalam pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap, dengan bobot tertinggi sebesar 26,9% dan nilai inconsistency ratio 0,03 yang menunjukkan tingkat konsistensi pengambilan keputusan yang baik. Indikator dari aspek ini mencakup subsidi faktor produksi, penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau, serta investasi pihak

swasta dalam mendukung ketersediaan input. Faktor produksi sebagai prioritas tertinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pelaku kebijakan harus mengutamakan program-program penyediaan input baik dalam bentuk subsidi, distribusi pupuk dan benih berkualitas, hingga kerja sama dengan sektor swasta. Kebijakan yang tepat dalam aspek ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan hasil panen.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi intensifikasi, yaitu peningkatan hasil pertanian melalui optimalisasi penggunaan input pada lahan yang telah ada, dipandang sebagai pendekatan paling realistis dan dibutuhkan oleh para petani. Hal ini sejalan dengan Teori Produksi Neoklasik yang dikemukakan oleh Marshall, 1924 (Lubis, dkk 2019) dan Clark 2015 (Ginting, dkk 2022), yang menekankan bahwa produksi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan kombinasi faktor-faktor produksi yang tersedia, terutama dalam kondisi keterbatasan lahan atau sumber daya tetap lainnya. Dalam konteks ini, penyediaan input (seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida) secara kontinu dan terjangkau menjadi kunci agar petani dapat mencapai produktivitas maksimal dari lahan yang mereka miliki.

Selain itu, Studi Sakina (2020) di Kabupaten Sumenep juga menemukan bahwa aspek pengadaan input merupakan prioritas utama dalam strategi pengembangan usahatani padi, menguatkan relevansi temuan ini. Hal serupa juga dijumpai pada penelitian Setiawan & Fafurida (2013) mengenai kedelai, di mana penyediaan faktor produksi secara kontinu menjadi alternatif terpenting untuk pengembangan komoditas pertanian.

Peran investasi swasta juga menjadi penopang penting dalam mendukung strategi intensifikasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardja & Mandala (2010) yang menyatakan bahwa efisiensi proses produksi sangat tergantung pada tersedianya input yang berkualitas dan aksesibilitasnya bagi petani. Dengan keterlibatan swasta, distribusi dan ketersediaan input dapat lebih dijamin, mengurangi ketergantungan pada pemerintah dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang.

Posisi aspek budidaya di urutan kedua (23,8%) juga menunjukkan bahwa teknik dan praktik di lapangan tetap penting, namun bergantung pada tersedianya input yang memadai, sebagai prioritas kedua, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis petani, pelatihan, dan penerapan teknologi tepat guna. Hal ini berarti bahwa penyediaan input saja tidak cukup tanpa kemampuan petani dalam mengelolanya secara efisien.

Sementara aspek pasca panen (18,5%) menunjukkan bahwa meskipun berada di posisi ketiga, penanganan hasil panen seperti penyimpanan dan pengolahan tetap penting untuk menjaga kualitas dan nilai jual produk. Ini menjadi area yang perlu didukung dengan infrastruktur dan pelatihan. Kebijakan Pemerintah (17,3%) mengisyaratkan bahwa regulasi, program insentif, serta koordinasi lintas sektor harus bersifat mendukung dan responsif terhadap kebutuhan lapangan dan terakhir aspek kelembagaan (13,5%) menempati urutan lebih rendah, menunjukkan bahwa meskipun penting, aspek-aspek tersebut lebih bersifat pendukung dibandingkan dengan faktor produksi sebagai

inti dari strategi pengembangan, Walaupun berada di urutan paling rendah, pemerintah Kabupaten Sidrap tentu saja tidak bisa mengabaikan peran kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan lokal karena tetap penting untuk mendukung keberlanjutan sistem usaha tani. Dengan demikian, strategi intensifikasi yang mengandalkan peningkatan efisiensi dan efektivitas input produksi dapat dianggap sebagai pilihan strategis utama dalam konteks Sidrap karena langsung menyentuh kebutuhan praktis petani serta selaras dengan teori dan pengalaman empiris sebelumnya dalam sektor pertanian.

Hasil ini sejalan dengan studi Sakina (2020) di Kabupaten Sumenep yang juga menemukan bahwa pengadaan input menjadi strategi prioritas tertinggi. Begitu pula dengan penelitian Setiawan & Fafurida (2013) tentang pengembangan kedelai yang menekankan ketersediaan faktor produksi secara kontinyu sebagai strategi utama. Penelitian-penelitian ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan peningkatan produktivitas sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai dan dapat dijangkau petani.

Namun, temuan ini berbeda dari studi Pratama & Sahaya (2014), yang menempatkan aspek budidaya sebagai kriteria utama dalam strategi pengembangan usaha tani kedelai di Jawa Tengah. Demikian pula Rahmawati, R (2016) dalam konteks usahatani kopi, yang menunjukkan bahwa hambatan utama justru berasal dari belum optimalnya praktik budidaya dan pengolahan pasca panen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks wilayah dan komoditas sangat memengaruhi prioritas strategi.

Setelah bobot aspek/kriteria didapatkan, selanjutnya dilakukan pengecekan konsistensi untuk matrik perbandingan berpasangannya. Jika lebih dari 0.1 maka harus dilakukan perbandingan berpasangan kembali sampai didapat ratio kurang dari atau sama dengan 0.1 (konsisten). Hal yang serupa dilakukan juga terhadap masing-masing matriks perbandingan antar sub kriteria atau alternatif.

Setelah bobot kriteria dan bobot sub kriteria didapatkan maka dihitung total dari perkalian antara bobot alternatif dengan bobot kriteria yang bersesuaian. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor variabel lainnya dalam menentukan strategi pengembangan usaha tani padi menurut persepsi responden. Tahapan pembobotan dalam *AHP* dapat dilihat pada gambar 5.6. Dengan memasukkan unsur persepsi maka metode *AHP* dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif.

Tabel 6. Bobot Level Pertama dan Kedua Faktor Pengembangan Usaha Tani Padi

Level Pertama		Level Kedua		Bobot Final
Aspek	Bobot	Variabel	Bobot	
Faktor Produksi	269	Penyediaan Faktor Produksi Secara Kontinyu dan Terjangkau	0.579	0.148
		Subsidi Faktor Produksi	0.267	0.068
		Investasi Pihak Swasta dalam Penyediaan Faktor Produksi	0.154	0.039
Budidaya	238	Merangsang Menggunakan Benih Unggul dan Berlabel	0.501	0.131
		Pendampingan Kepada Petani	0.322	0.084
		Merangsang Pupuk Organik dan Pestisida Organik	0.177	0.046
Pasca Panen	185	Penyuluhan dan Edukasi Tentang Penanganan Pasca Panen yang Efektif	0.587	0.101
		Kemitraan Petani dengan Pengusaha Besar	0.413	0.072
		Bantuan Teknis Kepada Petani	0.479	0.095
Kebijakan Pemerintah	173	Dukungan Kebijakan Penetapan HPP	0.321	0.064
Kelembagaan	135	Kebijakan Infrastruktur	0.200	0.040
		Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	0.661	0.074
		Insentif Bagi Lembaga Tani yang Aktif	0.240	0.027
		Revitalisasi KUD Serta Lembaga Penyuluhan	0.099	0.011
TOTAL				1,00

Sumber: Hasil Olah Data primer, Tahun 2024

Perhitungan *Matriks Priority Vector* yang menunjukkan persepsi Pegawai DTPHPKP, BPP dan Ketua Poktan tentang strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Faktor yang paling penting dalam pengembangan usaha tani padi adalah aspek faktor produksi. Dalam aspek faktor produksi, variabel penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau merupakan variabel yang paling penting bila dibandingkan dengan variabel subsidi faktor produksi

dan investasi pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi. Bobot variabel penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau sebesar 57.9%, sedangkan bobot variabel subsidi faktor produksi sebesar 26.7%, dan bobot variabel investasi pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi sebesar 15.4%. Aspek faktor produksi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan usaha tani karena aspek faktor produksi ini mempengaruhi efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan usaha tani, disisi lain aspek faktor produksi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan regulasi. Petani dapat meningkatkan produktivitasnya dan bisa mengatasi tantangan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti subsidi, asuransi pertanian, dan program pelatihan.

Aspek budidaya juga merupakan aspek strategi pengembangan usaha tani padi. Variabel dalam aspek budidaya ini meliputi pendampingan kepada petani, merangsang pupuk organik dan pestisida organik, dan yang terakhir merangsang menggunakan benih unggul dan berlabel. Variabel merangsang menggunakan benih unggul dan berlabel ini menempati urutan pertama dengan bobot 50,1%, kemudian diikuti oleh variabel pendampingan kepada petani dengan bobot sebesar 32,2% dan variabel merangsang pupuk organik dan pestisida organik 17,7%. Aspek budidaya dalam pengembangan usaha tani mencakup berbagai praktik dan teknik yang digunakan untuk menanam agar dapat menghasilkan produk yang optimal, aspek budidaya juga berkaitan dengan pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Dalam pemberian pupuk yang tepat dan penggunaan pestisida yang tepat serta penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen serta dapat melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit.

Aspek pasca panen memiliki dua variabel, yaitu variabel penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif dan kemitraan petani dengan pengusaha besar. Aspek pasca panen berkaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan setelah tanaman dipanen hingga produk siap dikonsumsi atau dipasarkan, mulai dari pemanenan, penyortiran dan pemilahan, pembersihan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, pengolahan, pemasaran hingga pengendalian mutu. Dalam aspek pasca panen, variabel penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif merupakan variabel yang paling penting, hal ini dapat dilihat dari besarnya bobot yang mencapai 58.7%, lebih besar dibandingkan dengan bobot variabel kemitraan petani dengan pengusaha besar dengan bobot 41.3%.

Aspek kebijakan pemerintah, terdapat tiga variabel yaitu bantuan teknis kepada petani, dukungan kebijakan hpp, dan kebijakan infrastruktur. Aspek kebijakan pemerintah berkaitan dengan subsidi dan bantuan finansial seperti halnya pemerintah sering memberikan subsidi untuk input pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Infrastruktur pertanian juga mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha tani karena dengan adanya pengembangan infrastruktur seperti jalan irigasi, jalan desa, pasar tani, dan fasilitas penyimpanan yang memadai dapat mendukung produktivitas dan

akses pasar. Dari tiga variabel tersebut, variabel bantuan teknis kepada petani merupakan variabel yang lebih penting dalam pengembangan usaha tani padi dengan bobot sebesar 47.9%, lebih besar jika dibandingkan dengan dukungan kebijakan penetapan HPP dengan bobot 32.1%, dan yang terakhir variabel kebijakan infrastruktur dengan bobot sebesar 20,0%.

Yang paling kecil adalah aspek kelembagaan, terdapat tiga variabel yaitu variabel penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok tani dengan bobot 66.1%, selanjutnya insentif bagi lembaga tani yang aktif dengan bobot 24.0% dan yang terakhir Revitalisasi KUD serta lembaga penyuluhan dengan bobot 9,9%.

Tabel 7. Bobot Final Variabel Penentu Pengembangan Usaha Tani Padi

Variabel	Bobot Final	Rangking
Penyediaan Faktor Produksi Secara Kontinyu dan Terjangkau	0.148	1
Merangsang Menggunakan Benih Unggul dan Berlabel	0.131	2
Penyuluhan dan Edukasi Tentang Penanganan Pasca Panen yang Efektif	0.101	3
Bantuan Teknis Kepada Petani	0.095	4
Pendampingan Kepada Petani	0.084	5
Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	0.074	6
Kemitraan Petani dengan Pengusaha Besar	0.072	7
Subsidi Faktor Produksi	0.068	8
Dukungan Kebijakan Penetapan HPP	0.064	9
Merangsang Pupuk Organik dan Pestisida Organik	0.046	10
Kebijakan Infrastruktur	0.040	11
Investasi Pihak Swasta dalam Penyediaan Faktor Produksi	0.039	12
Insentif bagi Lembaga Tani yang Aktif	0.027	13
Revitalisasi KUD serta Lembaga Penyuluhan	0.011	14

Sumber: Hasil Olah Data primer, Tahun 2024

Penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau menempati urutan pertama dalam penentu pengembangan usaha tanu padi di Kabupaten Sidrap dengan bobot sebesar 14.8%. peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh variabel merangsang menggunakan benih unggul dan berlabel dan penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif dengan bobot masing-masing sebesar 13.1% dan 10,1%. Kemudian disusul oleh variabel bantuan teknis kepada petani dengan bobot sebesar 9.5%. variabel pendampingan kepada petani dan penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok tani diurutan kelima dan keenam memiliki bobot masing-masing sebesar 8.4% dan 7.4%.

Variabel kemitraan petani dengan pengusaha besar diurutan berikutnya dengan bobot sebesar 7.2%, kemudian ada variabel subsidi faktor produksi dan dukungan kebijakan HPP diurutan kedelapan dan kesembilan dengan bobot masing-masing sebesar 6.8% dan 6.2%. diurutan selanjutnya adalah variabel merangsang pupuk organik dan pestisida organik berada diurutan kesepuluh dengan bobot sebesar 4.6%, variabel kebijakan infrastruktur diurutan kesebelas

sebesar 4.0%, variabel investasi pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi diurutan berikutnya sebesar 3.9%, kemudian disusul lagi oleh variabel insentif bagi lembaga tani yang aktif dengan bobot sebesar 2.7% dan variabel yang terakhir adalah revitalisasi KUD serta lembaga penyuluhan dengan bobot sebesar 1,1%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, menunjukkan bahwa untuk mendorong pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus fokus pada beberapa aspek yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Aspek faktor produksi, yang melibatkan ketersediaan benih unggul, pupuk, tenaga kerja, dan lahan, harus menjadi prioritas utama, karena input-input ini adalah faktor dasar yang mendasari kemampuan petani dalam memproduksi hasil yang optimal. Tanpa ketersediaan sarana produksi yang mencukupi dan terjangkau, upaya peningkatan produktivitas akan sulit tercapai. Sebaiknya pemerintah menetapkan subsidi dan distribusi pupuk serta benih unggul yang berkelanjutan serta mudah dijangkau dan perlunya pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan distribusi input secara efisien dan tepat waktu.

Selain itu, penguatan aspek budidaya, pasca panen, kebijakan pemerintah, dan kelembagaan menyoroti pentingnya pendampingan teknis dan pembinaan berkelanjutan bagi petani, dalam hal ini sebaiknya pemerintah mengadakan pelatihan dan pendampingan intensif tentang teknik budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga pendidikan pertanian harus bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan teknis petani terkait metode terbaru dalam budidaya padi yang dapat meningkatkan hasil dan mengurangi biaya produksi. Juga sangat penting bagi pemerintah untuk membentuk dan memperkuat kelompok tani dan koperasi pertanian untuk meningkatkan kerjasama antar petani.

Aspek lain yang perlu perhatian pemerintah adalah infrastruktur pendukung, seperti irigasi dan akses ke lahan pertanian, serta memastikan akses terhadap fasilitas pendukung lainnya, seperti pasar, teknologi, dan sumber daya, agar petani memiliki sumber daya yang memadai untuk produksi yang optimal. Peran kelembagaan petani menjadi kunci dalam mewujudkan kerjasama yang efektif antara petani, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan keberlanjutan pertanian.

Selain itu Pemerintah daerah perlu memberikan insentif kepada petani yang menerapkan teknologi baru dalam budidaya padi, seperti benih unggul dan teknologi irigasi efisien. Ini dapat dilakukan melalui pemberian subsidi atau pembiayaan berbunga rendah bagi petani yang ingin berinvestasi dalam teknologi pertanian atau menyediakan skema pembiayaan khusus untuk petani,

khususnya bagi mereka yang membutuhkan modal untuk membeli pupuk, benih, dan alat produksi. Pembiayaan ini bisa berupa pinjaman lunak atau subsidi bunga, yang dapat diakses melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro. Kebijakan yang mengarah pada peningkatan investasi swasta di sektor pertanian juga diperlukan, untuk memastikan ketersediaan dan akses terhadap input produksi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Arista Kusuma Anggraini, A., Yurisinthae, E., & Imelda. (2018). Strategi Pengembangan Usahatani Jagung Manis di Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Artikel Ilmiah.
- (2) Dermoredjo, S. K. (2014). Analisis Kebijakan Pengembangan Padi di Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN.
- (3) Ginting, T., Messakh, O. S., & Lapenangga, N. J. (2022). Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (4) Hura, S. L. (2024). Analisis Pendapatan dengan Kelayakan Usahatani Karet dan Kapulaga dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Total Petani di Desa Hilimo'asio Dua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.
- (5) Issalillah, & Wisnujati. (2021). Manfaat Pisang Sebagai Buah Pencegah Preeklamsia.
- (6) Lubis, F. A., Harisudin, M., & Fajarningsih, R. U. (2019). *Development Strategy of Red Chili Agribusiness in Sleman Regency using Analytical Hierarchy Process Method*.
- (7) Mukhlisiana, M., & Roza Adry, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia.
- (8) Pratama, & Sahaya. (2014). Strategi Pengembangan Usahatani Kedelai Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia.
- (9) Purnama, R. P. A. (2014). Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi Terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar.
- (10) Rahardja, P., & Mandala, M. (2010). *Teori Ekonomi Mikro*. Lembaga Universitas Indonesia.
- (11) Rahmawati, Baruwadi, M., & Bahua, M. I. (2019). Peran Kinerja Penyuluh dan Efektivitas Pelaksanaan Penyuluhan pada Program Intensifikasi Jagung.
- (12) Rahmawati, R., (2016). Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi
- (13) Ricardo, D. (1817). *On The Principles of Political Economy and Taxation*.

- (14) Rosalina, M. D. (2017). Analisis Transformasi Pertanian Komoditas Padi dari Subsisten ke Komersial di Kabupaten Sidrap.
- (15) Saaty, T. L. (1994). *The Analytical Heirarchy Process*. McGraw-Hill. Sadono
- (16) Sukirno. (2002). Pengantar Teori Mikroekonomi
- (17) Sakina. (2020). Strategi Pengembangan Usahatani Padi di Kabupaten Sumenep.
- (18) Setiawan, A. B., & Fafurida; (2013). Strategi Pengembangan Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan dengan Pendekatan *Analysis Hierarchy Process (AHP)*.
- (19) Siburian, D. A., Santoso, I., & Effendi, U. (2017). Perencanaan Strategi Pengembangan dengan Menggunakan Metode *AHP* dan *TOPSIS* (Studi Kasus di UMKM Keripik Tempe "Putra Ridhlo" Malang).
- (20) William. (1967). Ekonomi Neo Klasik. Sejarah Pemikiran Ekonomi.